



DANA INSENTIF DAERAH

**Kebijakan DID dan Penggunaan Indikator
Stunting dalam Pengalokasian DID kepada
Pemerintah Daerah**

Jakarta, Mei 2021



Outline

1. PENDAHULUAN

2. DUKUNGAN MELALUI DID

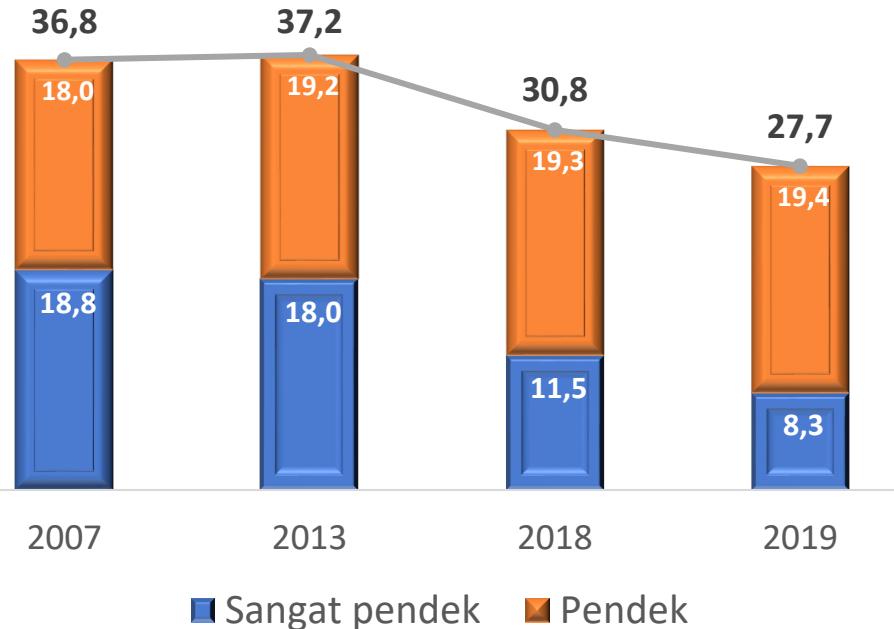
3. INDIKATOR PERHITUNGAN DID

4. INDIKATOR STUNTING DALAM PERHITUNGAN DID



PENURUNAN STUNTING SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL

Tren Stunting menurun tapi masih cukup tinggi



* Sumber Kemenkes



Target dalam RPJMN Prioritas Pembangunan
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
di tahun 2024 turun menjadi

- ❖ Angka kematian ibu (AKI) 183 per 100.000 kelahiran hidup
- ❖ Angka kematian bayi (AKB) 16 per 100.000 kelahiran hidup
- ❖ Angka kematian neonatal 10 per 1.000 kelahiran hidup
- ❖ Prevalensi stunting pada balita 14%
- ❖ Prevalensi wasting pada balita 7%



FAKTOR PENYEBAB STUNTING DAN MASALAH GIZI PADA BALITA



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Faktor Spesifik



Anemia pada anak,
remaja, dan Ibu Hamil



Pemeriksaan ANC
(kehamilan) <4 kali



Ibu hamil konsumsi
tablet tambah darah
(TTD)



Tidak ASI Eksklusif



Pemantauan
pertumbuhan balita tidak
rutin



Imunisasi tidak
lengkap



Asupan makanan balita 6-23 bulan
tidak terpenuhi terutama protein

Faktor Sensitif



Keluarga tidak bisa akses sanitasi yang
layak



Diare pada anak



Daerah dengan
kerawanan pangan



Penduduk yang hidup
di bawah garis kemiskinan

* Sumber Kemenkes



DUKUNGAN PENURUNAN STUNTING MELALUI DID



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan langkah strategis untuk mendukung tercapainya tujuan desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian insentif kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja

Tujuan DID

- Memberi rewards kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai kinerja baik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar public, pelayanan umum pemerintahan, serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja
- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kesehatan fiskal APBD
- Meningkatkan kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, **kesehatan**, infrastruktur dan pelayanan umum pemerintahan

→ Kategori kinerja DID dalam peningkatan pelayanan bidang kesehatan memuat kinerja dalam mendukung penurunan stunting dan juga kinerja dalam peningkatan faktor pendukung pengurangan stunting baik spesifik ataupun sensitif

Prinsip Pengalokasian DID

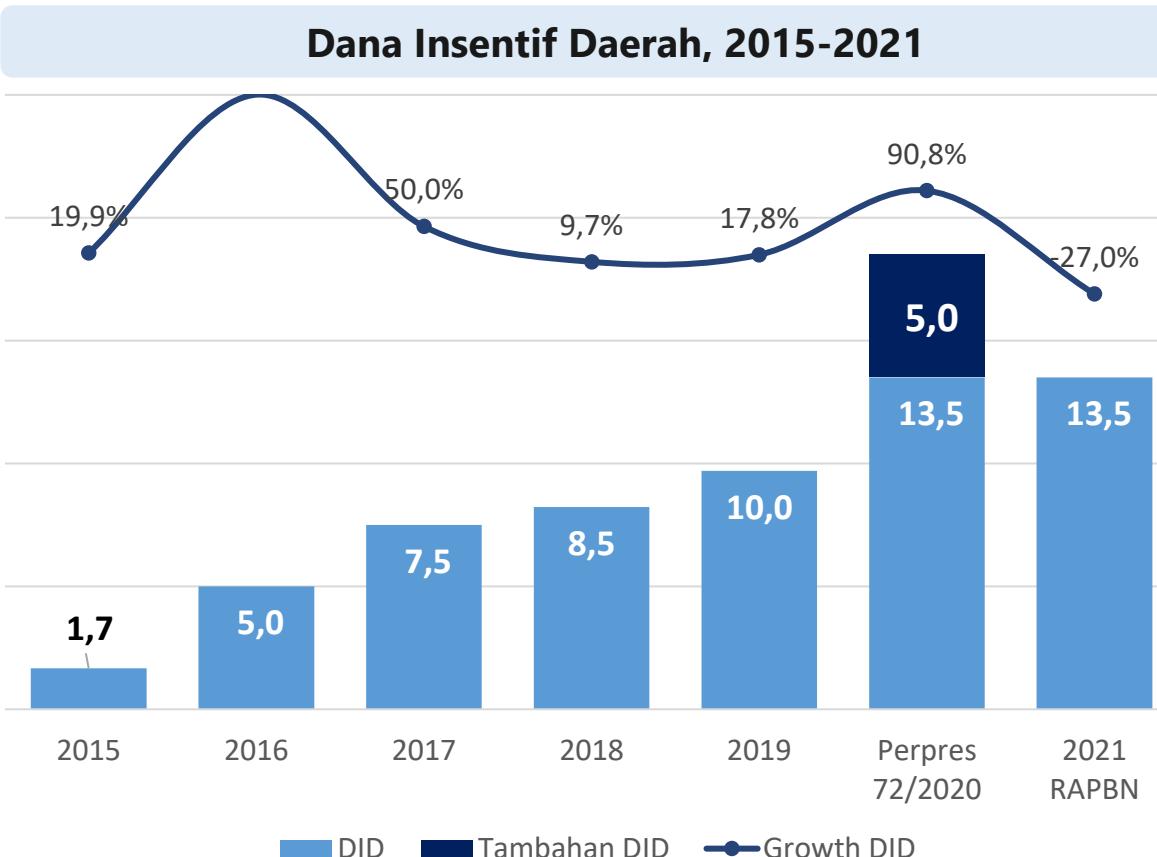
Kriteria utama dan kategori kinerja DID harus dapat mencerminkan prinsip Keadilan (fairness); Dapat diperbandingkan; Objektif; Terukur; Berkesinambungan; Akuntabel,



KEBIJAKAN DID TA 2021

Efektifitas dan efisiensi penggunaan DID dan Penyempurnaan formulasi DID (**RPJMN 2020 – 2024**)

Mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi daerah



- Mengedepankan **kriteria kinerja yang dinamis dan strategis** untuk mendorong daerah lebih kompetitif, seperti penurunan angka pengangguran, kinerja pengendalian inflasi, indeks pencegahan korupsi
- Menyederhanakan dan menjaga konsistensi formula DID
- Mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD
- Mempertajam indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional
- Memperkuat indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional
- Penyaluran berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan



INDIKATOR PERHITUNGAN DID

Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan **insentif/penghargaan** kepada daerah **atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja** di bidang **tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat**

Kriteria Utama

• 2021 •

- Opini BPK atas LKPD (WTP)
- Penetapan Perda APBD tepat waktu
- Penggunaan e-Government (*e-budgeting, dan e-procurement*)

Kategori Kinerja

1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah

- a. Kemandirian Daerah
- b. Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah
- c. Sistem Informasi Keuangan Daerah (baru)

2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan

- a. Angka Partisipasi Murni
- b. Peta Mutu Pendidikan

3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan

- a. Penanganan Stunting (*Balita*)
- b. Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap
- c. Persalinan di fasilitas kesehatan

4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur

- a. Akses sanitasi Layak
- b. Sumber air minum layak

5. Kesejahteraan Masyarakat

- a. Penurunan Penduduk Miskin
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- c. Penurunan Angka Pengangguran (baru)

6. Pelayanan Umum Pemerintahan

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- c. Penghargaan Pembangunan Daerah
- d. Inovasi Daerah

7. Peningkatan ekspor

- 8. Peningkatan Investasi
- 9. Pengelolaan Sampah
- 10. Pengendalian Inflasi Daerah (baru)
- 11. Indeks Pencegahan Korupsi (baru)



Dampak/Capaian Indikator

OPINI BPK (WTP)

2016	378
2017	411
2018	443

Penetapan Perda APBD Tepat Waktu



2017	435
2018	486
2019	514

e-Government (e-Budgeting)



2018	537
2019	533

e-Government (e-Procurement)



2018	533
2019	531

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah



2016	77,89	59,85
2017	78,30	60,19
2018	78,84	60,67

Baduta Stunting



2013	37,20
2018	30,80

Indeks Pembangunan Manusia



2016	70,18
2017	70,81
2018	71,39

Sumber Air Minum Layak



2016	71,14
2017	72,04
2018	73,68

Akses Sanitasi Layak



2016	67,80
2017	67,89
2018	69,27

Tingkat Kemiskinan



2016	11,13
2017	10,64
2018	9,82

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah Daerah, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik



VARIABEL STUNTING DALAM PERHITUNGAN DID



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Penggunaan variabel stunting sebagai perhitungan pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) mulai digunakan sejak perhitungan DID 2018.

Pada DID 2018 dan DID 2019 dilakukan perhitungan komposit kategori kesehatan yang didalamnya termasuk stunting, mulai DID 2020 perhitungan dilakukan per variabel sehingga terlihat kinerja daerah khususnya penanganan stunting.

DID TA 2020

- Indikator stunting yang diperhitungkan adalah persentase jumlah bayi dibawah dua tahun yang mengalami stunting
- Sebanyak 101 Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi DID TA 2020 dari kategori penanganan stunting dengan jumlah alokasi sebesar Rp1.078,15 miliar



DID TA 2021

- Indikator stunting yang diperhitungkan adalah persentase jumlah bayi dibawah lima tahun (balita) yang mengalami stunting
- Sebanyak 104 Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi DID TA 2020 dari kategori penanganan stunting dengan jumlah alokasi sebesar Rp969,45 miliar





INDIKATOR STUNTING DALAM PERHITUNGAN DID



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

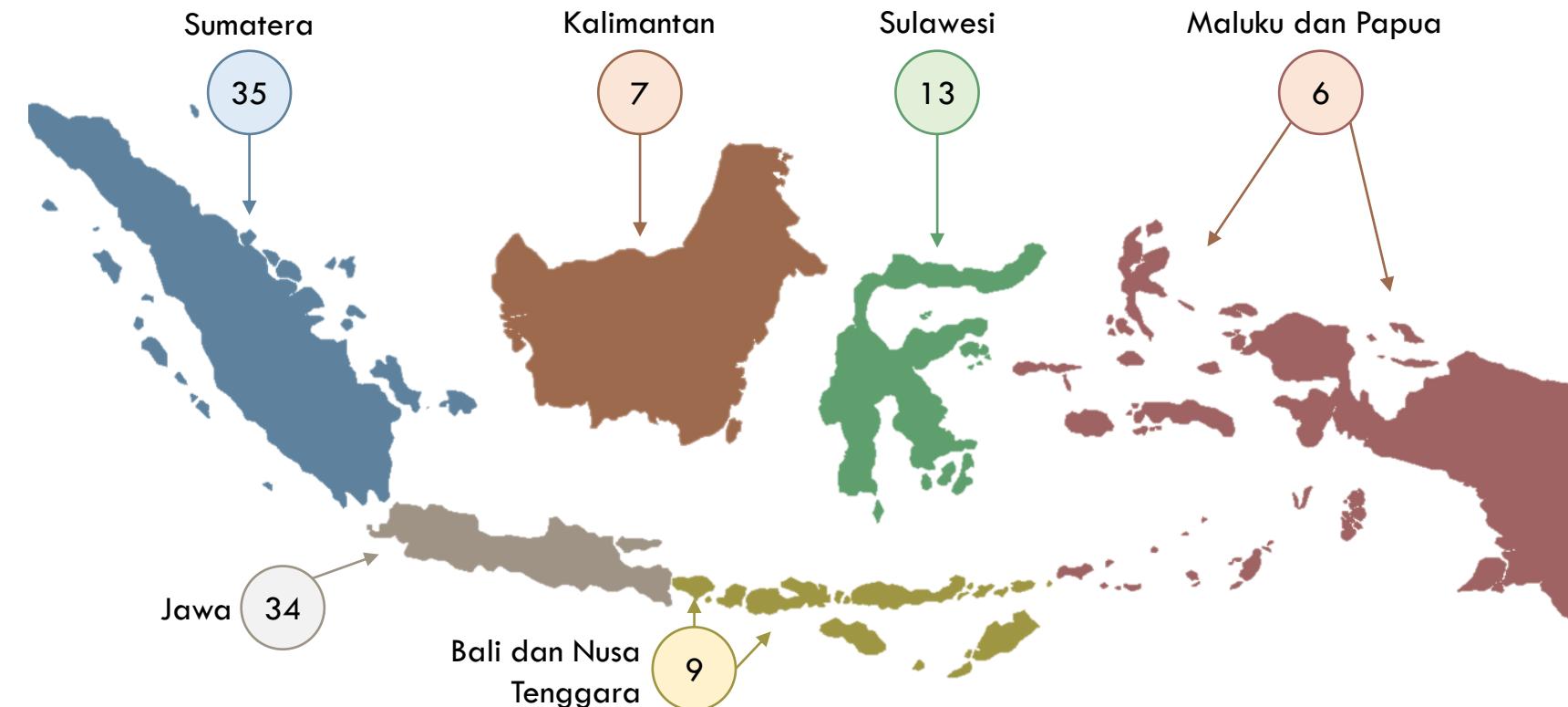
Penggunaan variabel stunting sebagai perhitungan pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) mulai digunakan sejak perhitungan DID 2018.

Pada DID 2018 dan DID 2019 dilakukan perhitungan komposit kategori kesehatan yang didalamnya termasuk stunting, mulai DID 2020 perhitungan dilakukan per variabel sehingga terlihat kinerja daerah khususnya penanganan stunting.



Pada pengalokasian DID TA 2021, sebanyak 104 Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi DID TA 2021 dari kategori penanganan stunting dengan jumlah alokasi sebesar Rp969,45miliar

- Alokasi DID menunjukkan daerah yang berkinerja baik dalam penurunan stunting
- Dominasi penerima DID kategori penurunan stunting didominasi daerah sumatera, dan berikutnya adalah Jawa



TERIMA KASIH



@**DitjenPK**



**direktorat jenderal
perimbangan keuangan**



ditjenpk



**1500420
Whatsapp 085214087800**